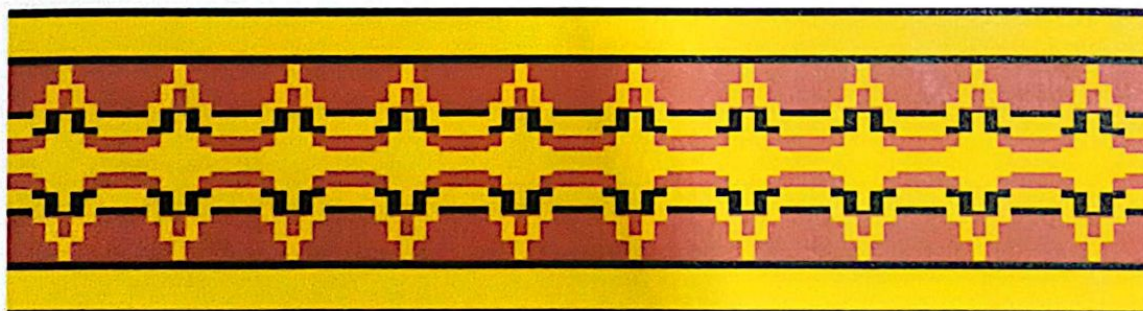




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.1.a	Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah	6
I.1.b	Proses Penyusunan Renja Perangkat	6
I.1.c	Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	7

I.2 LANDASAN HUKUM

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG, PP, PERDA DAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR

I.2.a	SOTK dan Kewenangan Perangkat Daerah	8
I.2.b	PEDOMAN YANG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH.....	9

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

PENJELASAN TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN DARI PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

I.3.a	MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
I.3.b	PEDOMAN YANG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH.....	13

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I.4.a	MENGURAIKAN POKOK BAHASAN DALAM PENULISAN RENJA PERANGKAT DAERAH SERTA SUSUNAN GARIS BESAR ISI DOKUMEN	13
-------	--	----

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.a	Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan.....	14
2.1.b	Kajian (Review) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya	14
2.1.c	Kajian (Review) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu (2024)	15
2.1.d	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Tabel T-C.29)	17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

2.2.a	Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berdasarkan IKU dan Tupoksi serta Peraturan Perundang-Undangan	29
2.2.b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMDT Provinsi Lampung (Tabel T-C30)	33

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.a	TINGKAT KINERJA PELAYANAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG DAN HAL KRITIS TERKAIT PELAYANAN	41
2.3.b	PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG.	42
2.3.c	DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (AKU), RPJMD, RPJMN DAN SDGs.....	43
2.3.d	TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG.	43
2.3.e	FORMULASI ISU-ISU PENTING DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG REKOMENDASI STRATEGIS.	46

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.a	PROSES YANG DILAKSANAKAN.....	47
2.4.b	ALASAN PENTING REVIEW DILAKSANAKAN.	47
2.4.c	PENJELASAN TEMUAN-TEMUAN PROSES PERBANDINGAN DAN CATATAN PENTING.....	47
2.4.d	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN 2024 (TABEL T-C.31)	48
2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	
2.5.a	HASIL KAJIAN TERHADAP PROGRAM /KEGIATAN YANG DIUSULKAN	61
2.5.b	PENJELASAN BAGAIMANA PROSES USULAN PROGRAM/KEGIATAN DIUSULKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN.	61
2.5.c	PENJELASAN KESESUAIAN USULAN DIKAITKAN DENGAN ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI.....	61
2.5.d	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (TABEL T-C.32)	62

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.a	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Dinas PMDT Provinsi Lampung	71
-------	---	----

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.a	TUJUAN	98
3.2.b	SASARAN	98

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.a	Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	99
3.3.b	Garis Besar mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan.	100
3.3.c	SIFAT PENYEBARAN LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN	104
3.3.d	TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF YANG DIRINCI BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA	104
3.3.e	PENJELASAN JIKA RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD, BAIK JENIS PROGRAM/KEGIATAN, PAGU INDIKATIF, MAUPUN KOMBINASI KEDUANYA.	105
3.3.f	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU	

TAHUN 2025. (Tabel T-C.33)	106
----------------------------------	-----

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung	117
---	-----

BAB V. PENUTUP

V.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.....	125
V.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan.	125
V.3 Rencana Tindak Lanjut	126
V.4 Tempat, Tanggal, Nama Perangkat Daerah, Nama Dan Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah, Cap Stempel	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1	T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2024 Prov.Lampung
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
Tabel 3	Perkembangan Alokasi dan Anggaran Dinas PMDT Provinsi Lampung sejak 2009-2024
Tabel 4	T-C.30 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMDT Provinsi Lampung
Tabel 5	Kinerja Dinas PMDT berdasarkan RPJMD Prov. Lampung 2019-2023
Tabel 6	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Tabel 7	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Dinas PMDT Provinsi Lampung
Tabel 9	T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
Tabel 10	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung

peningkatan kapasitas SDM Calon Transmigran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan.

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai penjabaran misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu **Mendorong terwujudnya Desa Mandiri di Provinsi Lampung dan Mendorong pengembangan BUMdes di Provinsi Lampung.**

3.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu **Meningkatkan Status Desa Mandiri dan Meningkatkan Status BUMDes.**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas PMDT digambarkan sebagai berikut ;

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Dinas PMDT Provinsi Lampung.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8
1.	Mendorong terwujudnya Desa Mandiri di Provinsi Lampung	Meningkatkan Status Desa Mandiri	Persentase desa mandiri	181 Desa 7,40	200 Desa 8,18	250 Desa 10,22
2	Mendorong pengembangan BUMdes di Provinsi Lampung	Meningkatkan status Bumdes	Persentase BUMDes yang berbadan HUKUM	24,5	28,6	32,7

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah merealisasikan visi dan misi Gubernur Lampung yang tertuang dalam 33 Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Dinas PMDT masuk pada Agenda Kerja ke-8 “SMART VILLAGE” yaitu meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-partisipasi dan Agenda Kerja ke-9 “PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.

3.3.b. Garis Besar mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada tahapan Ranwal RKPD memiliki kegiatan yang sesuai dengan Renstra dan nomenklatur pada Permendagri Nomor 86 tahun 2016, Namun dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur menjadi Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan penjabaran Kepmendagri 050-5889, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki **5 Program, 9 kegiatan serta 40 sub kegiatan**. Dengan persebaran lokasi kegiatan berada di 13 Kabupaten dengan sasaran desa. Selanjutnya total kebutuhan anggaran menurut sumber pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 16.969.775.280,05**.

Program

Selanjutnya Mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai Program yaitu:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan acuan bagi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Untuk menjalankan program tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, menjabarkan lebih lanjut program tersebut kedalam berbagai kegiatan meliputi :

1. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda

Sub Kegiatan

Berdasarkan Kegiatan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki sub kegiatan meliputi :

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
5. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis
6. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
7. Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota
8. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
9. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
11. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
12. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
13. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
14. Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
15. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
16. Penyuluhan Transmigrasi

17. Pelatihan Transmigrasi
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
20. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
22. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
23. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
24. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD
25. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
26. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
31. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
32. Penyediaan Bahan Material
33. Fasilitasi Kunjungan Tamu
34. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
36. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
40. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3.3.c. SIFAT PENYEBARAN LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam hal penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, terbagi pada beberapa lokus berdasarkan sifatnya:

Untuk Kegiatan yang bersifat Rutin Urusan Penunjang Daerah dan Administrasi Perkantoran dilokasikan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung, sedangkan untuk beberapa program Prioritas tersebar yaitu, Program Kerjasama Desa lokasi tersebar pada Desa pembina BUMDESMA, Administrasi Pembangunan Desa dengan lokasi tersebar pada 13 Kabupaten, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tersebar pada 13 Kabupaten, serta Program Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sebaran lokasi kawasan transmigrasi.

3.3.d TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF YANG DIRINCI BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA

Secara keseluruhan total kebutuhan dana/ pagu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp.16.969.775.280,05** dengan rincian sumber pendanaan sebagai berikut:

Gaji Rp. 8.316.377.131 (Sumber Pendanaan DAU)

Program Kegiatan dan Rutin Rp.8.653.398149,05 (Sumber Pendanaan APBD bersumber dari Pajak)

3.3.e PENJELASAN JIKA RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD, BAIK JENIS PROGRAM/KEGIATAN, PAGU INDIKATIF, MAUPUN KOMBINASI KEDUANYA.

Rumusan Program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD pada Jenis Program/Kegiatan telah sesuai baik secara nomenklatur maupun indikator pada sub kegiatan berdasarkan Permendagri 19 tahun 2019. Namun dalam hal pagu indikatif masih terdapat perbedaan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan anggaran yang berbeda pada masing-masing sub kegiatan setiap tahunnya didasarkan pada usulan kebutuhan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

3.3.f RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC-33 diuraikan pada tabel pada halaman berikut (terlampir)

Tabel 9.

T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun
Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
1			3	5	6			10	11
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	LAMPUNG	25	170.560.000	APBD		25	170.560.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	LAMPUNG	5	170.560.000	APBD		5	170.560.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan	LAMPUNG	1	170.560.000	APBD		1	170.560.000

2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	LAMPUNG	25	1.175.760.000	APBD	25	2.490.560.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Desa serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LAMPUNG	130	1.175.760.000	APBD	130	2.490.560.000
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LAMPUNG	1	220.730.000	APBD	1	170.000.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	LAMPUNG	1	255.030.000	APBD	4	350.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LAMPUNG	1	200.000.000	APBD	1	170.560.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LAMPUNG	1	500.000.000	APBD	1	500.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LAMPUNG	1	0	APBD	1	100.000.000

	Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LAMPUNG	1	0	APBD		1	1,200,000,000
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	LAMPUNG	100	500,000,000	APBD		100	500,000,000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	LAMPUNG	33	500,000,000	APBD		33	500,000,000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	LAMPUNG	30	200,000,000	APBD		30	200,000,000
	Penyuluhan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapat penyuluhan	LAMPUNG	30	200,000,000	APBD		30	200,000,000

	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	LAMPUNG	30	100.000.000	APBD		30	100.000.000
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	LAMPUNG	25	1.438.745.000	APBD		25	1.524.145.000
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasi menggunakan smart village	LAMPUNG	130	1.438.745.000	APBD		130	1.524.145.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	LAMPUNG	1	101.500.000	APBD		1	101.500.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa & Kelurahan	LAMPUNG	1	410.000.000	APBD		1	400.000.000
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	LAMPUNG	1	474.240.000	APBD		1	500.000.000

	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	LAMPUNG	1	250,000,000	APBD		1	319,640,000
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa	LAMPUNG	1	101.505.000	APBD		1	101.505.000
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	LAMPUNG	1	101.505.000	APBD		1	101.505.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	LAMPUNG	100	13.484.710.280,05	APBD		100	15.121.951.909,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	LAMPUNG	100	150,000,000	APBD		100	150,000,000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LAMPUNG	5	45,000,000	APBD		5	45,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAMPUNG	2	50,000,000	APBD		2	50,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAMPUNG	4	55,000,000	APBD		4	55,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	LAMPUNG	100	9.566.877.131	APBD		100	11.461.746.360
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LAMPUNG	12	8.316.377.131	APBD		12	9.411.246.360
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	LAMPUNG	3	1.200.000.000	APBD		3	2.000.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	LAMPUNG	3	25,000,000	APBD		3	25,000,000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	LAMPUNG	12	25.500.000	APBD		12	25.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi barang milik daerah	LAMPUNG	100	70.000,000	APBD		100	70.000,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	LAMPUNG	1	25.959,000	APBD		1	25.959,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	LAMPUNG	1	44.041,000	APBD		1	44.041,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian	LAMPUNG	100	350.000,000	APBD		100	350.000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LAMPUNG	10	100.000,000	APBD		10	100.000,000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	LAMPUNG	200	250,000,000	APBD		200	250,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi umum	LAMPUNG	100	1,880,893,000	APBD		100	2,054,181,200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	12	44,495,600	APBD		22	44,495,600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	12	241,067,400	APBD		12	241,067,400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LAMPUNG	12	30,000,000	APBD		12	30,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	LAMPUNG	12	25,000,000	APBD		12	25,000,000
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	LAMPUNG	12	35,000,000	APBD		12	34,908,200

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas	LAMPUNG	12	100,000,000	APBD	12	200,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	LAMPUNG	12	1,136,835,000	APBD	12	1,146,835,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	LAMPUNG	1	268,495,000	APBD	1	331,875,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan	LAMPUNG	100	1.032.440.149,05	APBD	100	661,524,349
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAMPUNG	12	140.000.149,05	APBD	12	126,484,349
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	12	892.440.000	APBD	12	535,040,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah	LAMPUNG	100	434.500.000	APBD	100	374,500,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LAMPUNG	4	250.000.000	APBD	4	250.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LAMPUNG	35	24.500.000	APBD	35	24.500.000
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	LAMPUNG	1	100.000.000	APBD	1	100.000.000
					16.969.775.280,05			19.807.216.909

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung merupakan Dinas dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang memuat misi ke 2 dan ke-5 dari RPJMD Provinsi Lampung memiliki Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang digambarkan pada tabel berikut.

TABEL 10. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung

MISI 5 “Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan”							
NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN dan SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7	Rp 8	
	Mendorong Pengembangan BUMDes di Provinsi Lampung	Meningkatkan Status BUMDes	A. Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	170.560.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	170.560.000	
				1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan	170.560.000	

				4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	200.000.000	
				5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	500.000.000	
				6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	
				7	Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	
			C		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	500.000.000	
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	500.000.000	
				8	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	200.000.000	

					Penyuluhan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapat penyuluhan	200.000.000	
					Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	100.000.000	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	1.438.745.000	
				Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village	1.438.745.000	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	101.500.000	
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	410.000.000	
				10	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	474.240.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Penetapan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	250.000.000	

									Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa	101.505.000	
								11	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota	101.505.000	
									Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	13.484.710.280,05	
									Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	150.000,000	
								14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000,000	
								15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000,000	
								16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000,000	
								G.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.566.877.131	

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.316.377.131	
			17	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000.000	
			18	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
			19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	25.500.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase peningkatan kapasitas administrasi barang milik daerah	70.000.000	
			20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.959.000	
			21	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.041.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian	350.000.000	
			23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250,000,000	
						Persentase peningkatan kapasitas administrasi umum	1,880,893,000	
				25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	44,495,600	
				26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	241,067,400	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30,000,000	
				27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25,000,000	
				28	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35,000,000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	100,000,000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,136,835,000	
				29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	268,495,000	

					30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda				Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan	1.032.440.149,05	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	140.000.149,05	
					32					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	892.440.000	
					33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda				Persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah	434.500.000	
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250.000.000	
					35					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.500.000	
					36					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100.000000	
						TOTAL					16.969.775.280,05	

BAB V PENUTUP

V.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Dinas PMDT. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

Selanjutnya Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

V.2 KAJIDAH - KAJIDAH PELAKSANAAN

Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani

antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

pelaksanaan

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbagian, dan seluruh staf/aparatur Dinas PMDT Provinsi Lampung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan pelaksanaan triwulanan. dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

V.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2025.

Bandar Lampung, September 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIRASI
PROVINSI LAMPUNG**



Dr. ZAIDIRINA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19691011 199402 2 001